



Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2019
WTP Keempat Untuk Kabupaten Lebong

Bengkulu – Humas BPK

Prestasi membanggakan diraih Pemerintah Kabupaten Lebong yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019. Capaian tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Lebong berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Andri Yogama, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD TA 2019 kepada Bupati Lebong, Rosjonsyah dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Carles Ronsen, di Kantor BPK Perwakilan Bengkulu, Kamis, 25 Juni 2020.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, maka BPK memberikan opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Lebong TA 2019 dengan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)”, jelas Andri Yogama.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyebutkan, meskipun Pemerintah Kabupaten Lebong meraih opini WTP tetapi BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern yaitu Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Pajak Daerah Tidak Memadai, Jumlah Tenaga Kerja Kontrak Tahun 2019 Melebihi Kebutuhan, APBD TA 2019 Belum Memadai, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOP PAUD Tidak Memadai, Bidang Tanah Belum Mempunyai Bukti Kepemilikan yang Sah, dan Ruas Jalan dengan Nilai Buku Senilai Rp0,00 dan Memiliki Masa Manfaat 0 Tahun.

Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tidak Memadai dan Terdapat Kekurangan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum; Kendaraan Dinas Melebihi Ketentuan dan Biaya Transport Tidak Sesuai Ketentuan; Kelebihan Pembayaran Biaya Personil pada Kontrak Jasa Konsultansi; Kurang Volume Paket Pekerjaan dan Membebani Anggaran TA 2020; dan Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan.

Dalam pidatonya, Kepala Perwakilan menyampaikan Pemeriksaan Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh BPK, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai “**kewajaran**” laporan keuangan bukan merupakan “**jaminan**” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Menutup sambutannya, Kepala Perwakilan meminta kepada Bupati dan jajarannya untuk wajib menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan juga menyinggung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong. Berdasarkan data di BPK, sampai dengan Semester II TA 2019 persentase penyelesaian tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Lebong hanya mencapai 59,55%. Untuk itu Kepala Perwakilan meminta supaya Bupati Lebong untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan kepada DPRD untuk terus mendorong upaya percepatan tindak lanjut.

“BPK berharap agar LKPD yang telah diaudit ini, tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”, tutup Kepala Perwakilan mengakhiri sambutannya. (***/htu)

SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

Contact Person:

Rony Setyo Kurniawan
Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu